

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Masyarakat Yang Tidak Menggunakan Hak Pilihnya

Untuk menganalisis mengapa masyarakat memilih tidak menggunakan hak pilihnya dalam pilkades (golput) diuraikan sebagai berikut. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis yaitu, golput teknis, golput teknik politis, golput politis dan golput ideologis. Tiga hal inilah yang dianalisis dalam rangka mengetahui faktor penyebab tidak menggunakan hak pilihnya dalam pilkades. Berikut disajikan analisis yang dilengkapi dengan petikan wawancara.

a. Golput Teknis

Yaitu Mereka yang karena sebab-sebab teknis tertentu berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara atau mereka yang keliru mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tidak sah. Hal ini memang terdapat dalam pilkades di desa Waringinsari Barat

Hal tersebut seperti yang dinyatakan oleh Isoni:

“Saat pemilihan berlangsung saya *lagi* liburan ikut study tour sekolah. Saya memang sengaja *nggak* milih. Ini bukan masalah mengutamakan kepentingan pribadi atau bukan. Yang pasti saya percaya pada siapa aja calon yang menang untuk memimpin Waringinsari Barat.”

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Gesti:

“*Sebenarnya* saya bingung ikut milih atau *nggak*, karena waktu pemilihan berlangsung saya *lagi* kerja *trus* pekerjaan saya itu tidak bisa saya *tinggalin*.”

Selain itu, mengapa pemilih lebih mengutamakan kepentingannya di pertegas dengan alasan Putri. Ia sengaja tidak ikut memilih dan lebih memilih untuk bekerja.

Berdasarkan pendapat informan diatas dan juga dipertegas oleh tiga orang informan lainnya yaitu Winda, Ponijan dan Sujarwo, golput teknis memang terjadi ketika pilkades berlangsung, dimana masyarakat dikarenakan sebab teknis sehingga berhalangan hadir ketempat pemungutan suara.

Proses administrasi dalam pilkades bisa dikatakan baik karena: pertama, pemilih yang memenuhi persyaratan sudah terdaftar dalam DPT. Kedua, pemilih yang terdaftar memiliki kartu panggilan dan terdapat kesesuaian antara identitas pemilih dengan kartu panggilan. Hal ini seperti yang dikemukakan informan, mereka mendapat kartu panggilan dan terdapat kesesuaian identitas dengan kartu panggilan.

Kemudian berdasarkan penelusuran, diketahui bahwa data yang digunakan dalam pilkades diperoleh dari kartu keluarga dan data pilpres, pemilu legislatif, dan pilkada. Selain itu, dilengkapi dengan pendataan yang dilakukan oleh ketua RT. Dengan demikian, kekacauan administrasi dapat dihindarkan. Pada sisi lain, pemilihan dalam lingkup desa yang tidak terlalu luas, maka kemungkinan sangat

kecil jika seseorang yang berhak memilih tidak terdaftar dalam DPT dan tidak memiliki kartu panggilan dan karakteristik penduduk tidak didominasi pendatang baru.

Selanjutnya mengenai sosialisasi menjelang pilkades. Sosialisasi merupakan hal penting. Dengan sosialisasi tersebut masyarakat akan memperoleh informasi yang diperlukan. Selain itu, sosialisasi sebagai usaha pengenalan nama-nama calon agar masyarakat bisa menentukan pilihan.

Menurut beberapa informan, panitia pilkades tidak mengadakan sosialisasi sebelum pilkades dilaksanakan, sehingga terdapat banyak masyarakat yang golput begitu juga dengan surat suara yang tidak syah.

Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Ponijan:

“Saya *tau* ada 2 calon dan salah satu calonnya sudah pernah menjabat sebelumnya jadi kepala desa. Kalau soal sosialisasi *seingat* saya panitia tidak mengadakan sosialisasi sebelumnya.”

Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Isoni yang mengatakan:

“Saya tidak tahu kalau panitia mengadakan sosialisasi, malah menurut saya panitia tidak mengadakan sosialisasi sebelum pilkades tersebut berlangsung”.

Pernyataan di atas diperkuat oleh 4 informan lainnya, yaitu Sujarwo, Gesti, Winda dan Putri. Mereka mengakui bahwa tidak melakukan sosialisasi pemilihan. Mereka hanya mengetahui hal yang bersangkutan mengenai pilkades misalnya, waktu pelaksanaan, jumlah calon kepala desa, nama calon kepala desa hanya dari informasi yang

diperoleh dari teman, keluarga ataupun keluarganya. Kemudian, berdasarkan penuturan mereka, ada kesan bahwa Woto Siswoyo yang kini telah menjadi kepala desa lebih populer dibandingkan dengan Agus Waryanto. Tidak menutup kemungkinan hal ini disebabkan karena ia pernah menjadi kepala desa pada periode 1995-2003, sehingga ia lebih populer.

Sebenarnya, upaya untuk membujuk pemilih ke TPS merupakan tantangan bagi panitia pilkades. Untuk itu, panitia mendirikan TPS di tempat yang mudah dijangkau, yaitu kantor kepala desa Waringinsari Barat. Memang pemilihan dilakukan bukan pada hari libur, sehingga waktu luang menjadi kendala. Oleh karena itu, ada 3 tipe pemilih dilihat dari sisi teknis:

1. Mereka yang terdaftar sebagai pemilih, tapi tidak memiliki kesempatan untuk memberikan suara. Misalnya pemilih yang bekerja atau kuliah.
2. Mereka yang terdaftar sebagai pemilih, tetapi waktu pilkades bertepatan dengan waktu bekerja. Setidaknya, pemilih memiliki waktu untuk memberikan suara. Misalnya pegawai swasta.
3. Mereka yang terdaftar sebagai pemilih dan benar-benar memiliki waktu luang untuk memberikan suara. Misalnya guru dan petani.

Ketika disinggung kegiatan pilkades, Sujarwo tidak menyangkal bahwa ia memang tidak memilih karena sedang kerja. Alasan yang sama juga dikemukakan oleh Gesti. Kemudian Winda mengatakan

bahwa ia ada pekerjaan yang memang waktu itu tidak bisa di tinggal, sehingga ia lebih memilih ditempat kerja dari pada datang ke TPS.

Pada dasarnya kegiatan memilih atau tidak berpulang pada masing-masing pemilih. Seseorang mau memilih atau tidak adalah hak setiap warga negara. Karena itu berupa hak, maka boleh dilaksanakan atau tidak. Seandainya pemilihan merupakan kewajiban setiap warga negara, maka kewajiban itu harus dilakukan sehingga kemungkinan kecil sekali jika terjadi golput pada waktu pemilihan umum. Seseorang sengaja tidak memilih calon atas dasar pertimbangan tertentu. Caranya dengan tidak datang ke TPS saat pemilihan berlangsung, datang ke TPS tetapi tidak memilih, memilih merusak surat suarasehingga surat suaranya dinyatakan batal. Selain itu, golput juga dinilai sebagai bentuk protes terhadap pemerintah atau sikap melawan terhadap pelaksanaan pemilihan. Terkait dengan hal tersebut, pilkades merupakan bentuk protes akan dijelaskan pada faktor politis. Selain itu, golput bukanlah bentuk partisipasi yang berbahaya. Fakta menunjukkan di negara-negara yang menerapkan demokrasi belum terjadi golput yang mencapai 100%. Selalu terdapat presentase yang signifikan. Lain kata masyarakat masih berperan dalam pemilihan.

Kemudian, ada keenderungan pemilih lebih menutamakan kepentingan sendiri daripada datang ke TPS. Mereka yang golput bisa jadi benar-benar berniat golput. Sikap demikian bisa diartikan pemilih tidak menaruh perhatian atau enggan mengikuti pilkades. Faktanya, mereka

dengan mudah mendapatkan kartu panggilan dan akses ke TPS berada ditempat yang mudah dijangkau, tetapi mereka memilih golput.

Selain itu, pilkades yang tidak bertepatan dengan hari libur dijadikan alasan untuk tidak datang ke TPS. Dengan demikian, pemilih berniat benar-benar golput. Sujarwo mengungkapkan:

“Saya *lagi* kerja. *Sebenarnya* saya males ikut memilih. *Mending* saya kerja. Selain itu, *kalo nyoblos atau gak*, bagi saya *nggak* ada pengaruh. Siapapun kepala desanya *nggak* merubah keadaan Waringinsari Barat.”

Isoni membenarkan bahwa waktu pilkades bertepatan dengan liburannya yaitu ikut study tour sekolah ke Jawa. Ia menambahkan bahwa ia berangkat ke Jawa sebelu pilkades dilaksanakan.

Ketika pilkades berlangsung, tidak menutup kemungkinan ada pemilih yang sengaja tidak datang ke TPS dengan alasan percaya kepada siapa saja yang terpilih menjadi kepala desa. Seperti yang dikatakan Isoni:

“Saat pemilihan berlangsung saya *lagi* liburan ikut study tour sekolah. Saya memang sengaja *nggak* milih. Ini bukan masalah mengutamakan kepentingan pribadi atau bukan. Yang pasti saya percaya pada siapa aja calon yang menang untuk memimpin Waringinsari Barat.”

Alasan yang sama juga diungkapkan Putri:

“*Sebenarnya* saya sengaja *nggak* milih karena kerja. Bagi saya golput sah-sah saja. Selain itu, pada siapapun yang dipilih masyarakat mampu menjalankan tugasnya dengan baik.”

Terkait dengan kondisi diatas, Budiarto (371:2008) menyatakan bahwa ada kemungkinan orang itu memilih karena berpendapat bahwa keadaan tidak terlalu buruk dan bahwa siapapun yang akan dipilih

tidak akan mengubah keadaan itu. Dengan demikian, ia tidak perlu memanfaatkan hak pilih. Jadi “apatis” dalam pandangan ini tidak menunjukkan pada rasa kecewa atau frustrasi, malah sebagai manifestasi rasa puas dan kepercayaan terhadap sistem politik yang ada. Pendapat lain dinyatakan oleh Dahl dalam Budiarmo (371:2008) yang menyatakan bahwa di negara-negara barat, gejala tidak memberikan suara dapat diartikan sebagai cermin dari stabilitas sistem yang bersangkutan. Lain halnya dengan Irvin dalam Budiarmo (371:2008) yang menyatakan bahwa dalam beberapa keadaan tertentu, perasaan puas menyebabkan partisipasi yang rendah.

Ada pula pemilih yang mengutamakan kepentingannya karena pada waktu pemilihan bertepatan dengan waktu kerja pemilih, sehingga memilih golput. Gesti mengakui:

“*Sebenarnya* saya bingung ikut milih atau *nggak*, karena waktu pemilihan berlangsung saya *lagi* kerja *trus* pekerjaan saya itu tidak bisa saya *tinggalin*.”

Selain itu, mengapa pemilih lebih mengutamakan kepentingannya dipertegas dengan alasan Winda. Ia mengatakan bahwa ia lebih memilih kuliah yang waktunya bersamaan dengan pilkades.

Penuturan informan tersebut dipengaruhi kondisi politik dan pemerintahan desa yang stabil. Kondisi ini dijadikan alasan untuk tidak menggunakan hak pilih dan atas dasar inilah mereka lebih mengutamakan kepentingan mereka. Adanya fakta ini

mengindikasikan bahwa pemilih golput tidak selalu disebabkan alasan politis seperti tidak percaya pada pemerintah, calon favorit dan lain sebagainya.

b. Golput Teknis-Politis

Golput jenis ini adalah mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan dirinya atau pihak lain (lembaga statistik dan penyelenggara pemilu).

Proses administrasi dalam penyelenggaraan pilkades desa Waringinsari Barat memang tidak terjadi kesalahan. Artinya masyarakat terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Kemudian pemilih yang terdaftar dan mendapat kartu panggilan, terdapat kesesuaian antara identitas pemilih dengan kartu panggilan.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat beberapa informan yang mengatakan bahwa mereka terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan adanya kesesuaian antara identitas pemilih dengan kartu panggilan.

Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Isoni:

“ Terdaftar. Saya juga punya kartunya. Identitas saya juga sesuai dengan yang ada dikartu. Mengenai administrasi pilkades saya *gak tau* gimana palaksanaannya. Menurut saya penyelenggaraan pilkadesa oleh panitia bisa dikatakan baik”

Pernyataan yang sama juga dikeluarkan oleh Putri:

“Ya. Saya memang terdaftar dan saya juga punya kartunya. Identitas juga sesuai dengan kartu.”

Kemudian berdasarkan penelusuran, diketahui bahwa data yang digunakan dalam pilkades berasal dari kartu keluarga dan data dari pilpres, pemilu legislatif dan pemilukada.

Dapat penulis simpulkan bahwa masyarakat yang golput tidak ada yang tergolong kedalam golput teknik politis dikarenakan tidak adanya kekacauan administrasi dalam pilkades, sehingga sangat kecil kemungkinan adanya seseorang yang berhak memilih tetapi tidak terdaftar dalam DPT dan tidak mendapat kartu panggilan dalam pilkades.

c. Golput Politis

Untuk golput jenis ini adalah mereka yang tidak punya pilihan dari kandidat atau tidak percaya bahwa pemilu akan membawa perubahan dan perbaikan bagi desanya.

Ketika pilkades berlangsung tidak menutup kemungkinan ada pemilih yang sengaja tidak datang ke TPS dengan alasan tidak punya pilihan dan adanya rasa tidak percaya bahwa pemilu akan membawa perubahan dan perbaikan bagi desanya.

Kondisi tersebut dijadikan alasan untuk tidak menggunakan hak pilihnya, atas dasar inilah mereka lebih menutamakan kepentingan kepentingan mereka. Adanya fakta ini mengindikasikan bahwa memilih golput bisa disebabkan disebabkan terkait dengan alasan

politis seperti tidak percaya pada pemerintah, tidak ada calon favorit dan sebagainya.

Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sujarwo:

“ Saya *nggak* punya calon favorit. Saya *nggak* dukung bukan berarti karena masalah suku dan agama karena *setau* saya semua calon sukunya Jawa dan beragama Islam.”

Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh Ponijan:

“Saya *nggak* dukung siapa-siapa karena memang pada dasarnya *nggak* ada niat buat milih”.

Penuturan informan tersebut dipengaruhi kondisi politik dan pemerintahan desa yang sama saja dari dulu dan tidak terlalu ada perubahan yang berarti. Kondisi ini dijadikan alasan untuk tidak menggunakan hak pilihnya dan atas dasar inilah mereka lebih mengutamakan kepentingan mereka sendiri.

Kondisi tersebut sama seperti yang dikemukakan oleh Winda:

“Saya *nggak* mendukung siapa-siapa. Yang saya *tau cuma* salah satu calonnya itu pernah jadi kepala desa Waringinsari Barat sebelumnya dan sekarang *nyalon* lagi.”

Adanya fakta ini mengindikasikan bahwa memilih golput bisa disebabkan terkait dengan alasan politis seperti tidak percaya kepada pemerintah, tidak ada calon favorit, dan lain sebagainya.

Terkait dengan kondisi diatas, ada kemungkinan orang itu memilih karena berpendapat bahwa keadaan tidak terlalu buruk dan siapapun yang akan dipilih tidak akan mengubah keadaan itu. Dengan demikian, ia tidak merasa perlu memanfaatkan hak pilih.

d. Golput Ideologis

Golput ini diperuntukkan bagi mereka yang tidak percaya pada mekanisme demokrasi dan tidak mau terlibat didalamnya entah karena alasan fundamentalisme agama atau alasan politik-ideologi lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang tidak menggunakan hak pilihnya tidak ada yang tergolong ke arah golput ideologis. Hal ini dikarenakan alasan utama mereka tidak menggunakan hak pilihnya lebih mengarah ke alasan teknis dan politis saja.

Penilaian tersebut seperti yang dikatakan oleh Isroni:

“Saya mendukung calon yang terpilih karena pilihan mayoritas masyarakat adalah pilihan yang terbaik. Apapun latar belakang calon kepala desa seperti agama dan suku *nggak* jadi masalah buat saya. Selama calon pemimpin itu berkualitas, maka ia layak untuk menjalankan pemerintahan. Saya *nggak* milih bukan karena menganggap kepala desa *nggak* berkualitas, tetapi saya memang sengaja *nggak* milih.”

Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh Sujarwo:

“ Saya *nggak* punya calon favorit. Saya *nggak* dukung bukan berarti karena masalah suku dan agama karena *setau* saya semua calon sukunya Jawa dan beragama Islam.”

Berdasarkan penuturan mereka sangat jelas bahwa mereka tidak tergolong kedalam golput ideologis. Mereka tidak memandang apa agama dan suku para calon yang menyebabkan mereka tidak menggunakan hak pilihnya.

Berdasarkan analisis diatas, maka secara jelas masyarakat tidak memilih lebih mengarah pada: pertama, faktor teknis yaitu masyarakat lebih mengutamakan kepentingan mereka seperti kerja, liburan, kuliah dan lain-lain. Kedua, faktor politis yaitu masyarakat tidak memilih karena selama ini keadaan politik desa baik-baik saja. Masyarakat menilai keadaan desa akan sama saja siapapun kepala desanya, sehingga masyarakat merasa tidak percaya bahwa pilkades akan membawa perubahan dan perbaikan di desanya. Ketiga, mengenai faktor administrasi atau faktor teknik politis tidak menyebabkan golput karena penyelenggaraan pilkades oleh panitia bisa dikatakan baik, sehingga terhindar dari kekacauan administrasi.

B. Pembahasan

Sosialisasi Pilkades di Desa Waringinsari Barat 2011 yang selama ini dilakukan oleh panitia belum sepadan dengan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam penggunaan hak pilih dalam Pilkades. Di Desa Waringinsari Barat, sebagai obyek penelitian ini, tingkat partisipasi politik masyarakat sangat rendah, terbukti dari data yang terhimpun, yakni 1.249 dari keseluruhan jumlah pemilih sebanyak 3.733 pemilih atau sebesar 61%.

Sosialisasi Pilkades yang ternyata hanya sekedar menginformasikan akan adanya Pilkades belum menyentuh kesadaran pemilih akan pentingnya Pilkades bagi pemilih. Ini terlihat dari data yang diperoleh dimana pengetahuan dari responden yang telah peneliti jaring tentang adanya Pilkades sangat rendah.

Selanjutnya dalam memahami permasalahan yang muncul pada individu seputar alasan responden untuk tidak berpartisipasi dalam Pilkada (golput), peneliti membagi kondisi pelaku golput tersebut kedalam beberapa kategori, diantaranya adalah faktor teknis, factor tekik politis, faktor politis dan faktor ideologis. Penjelasan sebagai hasil dari penelitian ini terkait dengan latar belakang kondisi pelaku golput tersebut adalah sebagaimana yang peneliti sajikan di bawah ini.

1. Faktor Teknis

Seluruh responden mendapatkan kartu pemilih dan undangan. Namun apabila melihat pemilihan ini bagi responden adalah sebuah hak, maka sekecil apapun prosentase yang tidak mendapatkan kartu pemilih dan undangan.

Sedangkan alasan teknis lainnya adalah keadaan dimana kemungkinan responden memiliki kegiatan lain yang dapat menghalangi datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memberikan suaranya. Berdasarkan hasil yang peneliti peroleh, mayoritas responden memiliki kegiatan lain yang menghambat untuk memberikan suaranya. Kebanyakan dari responden lebih mementingkan kebutuhan ekonomi daripada mengurus kegiatan Pilgub ini yang menurut mereka tidak akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka.

2. Faktor Teknis-Politis

Berdasarkan penelusuran, diketahui bahwa data yang digunakan dalam pilkades berasal dari kartu keluarga dan data dari pilpres, pemilu legislatif dan pemilukada.

Dapat penulis simpulkan bahwa masyarakat yang golput tidak ada yang tergolong kedalam golput teknik politik dikarenakan tidak adanya kecacauan administrasi dalam pilkades, sehingga sangat kecil kemungkinan adanya seseorang yang berhak memilih tetapi tidak terdaftar dalam DPT dan tidak mendapat kartu panggilan dalam pilkades.

Proses administrasi dalam penyelenggaraan pilkades desa Waringinsari Barat memang tidak terjadi kesalahan. Artinya masyarakat terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Kemudian pemilih yang terdaftar dan mendapat kartu panggilan, terdapat kesesuaian antara identitas pemilih dengan kartu panggilan.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat beberapa informan yang mengatakan bahwa mereka terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan adanya kesesuaian antara identitas pemilih dengan kartu panggilan.

3. Faktor Politis

Mayoritas responden yang berhasil peneliti jaring, mereka beranggapan bahwa dengan adanya Pilkades ini tidak akan membawa perubahan yang signifikan. Sikap apatis ini bukan tanpa alasan, responden pada umumnya telah jenuh terhadap fenomena-fenomena silih bergantinya pemimpin yang menurut mereka semata-mata hanyalah perebutan kekuasaan untuk kepentingan elit itu sendiri. Terlebih, ketidakpercayaan responden juga semakin tinggi karena setiap kali diadakannya perebutan kursi kepemimpinan, mereka selalu saja disuguhkan dengan adanya ambisi-ambisi kekuasaan yang teramat fulgar dari para kandidat.

Fenomena demikian semakin meyakinkan responden bahwa setiap kali diadakannya perhelatan pemilihan pemimpin semacam Pilkades ini, responden hanya dijadikan sebuah alat untuk mengantarkan kandidat untuk menggapai ambisi kekuasaannya. Setelah mendapatkan kekuasaan itu, sebagaimana sebuah alat yang sudah terpakai fungsinya, maka akan dibuang begitu saja karena sudah hilang nilai manfaatnya. Demikian halnya anggapan responden. Setelah pemilihan berakhir, maka mereka akan terlupakan begitu saja.

Sejalan dengan itu, mayoritas responden juga menganggap bahwa dari segi sistem pemerintahan, dengan diadakannya Pilkades ini tidak akan membawa perubahan yang mendasar. Sistem birokrasi yang sudah sedemikian parahnya ini akan tetap sulit untuk adanya kemungkinan sebuah restrukturisasi.

4. Faktor Ideologis

Untuk golput jenis ini adalah mereka yang tidak punya pilihan dari kandidat atau tidak percaya bahwa pemilu akan membawa perubahan dan perbaikan bagi desanya.

Ketika pilkades berlangsung tidak menutup kemungkinan ada pemilih yang sengaja tidak datang ke TPS dengan alasan tidak punya pilihan dan adanya rasa tidak percaya bahwa pemilu akan membawa perubahan dan perbaikan bagi desanya.

Kondisi tersebut dijadikan alasan untuk tidak menggunakan hak pilihnya, atas dasar inilah mereka lebih menutamakan kepentingan kepentingan mereka. Adanya fakta ini mengindikasikan bahwa memilih golput bisa disebabkan disebabkan terkait dengan alasan politis seperti tidak percaya pada pemerintah, tidak ada calon favorit dan sebagainya.